

RELEVANSI DEMOKRASI DELIBERATIF JÜRGEN HABERMAS DENGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

RELEVANCE OF JÜRGEN HABERMAS'S DELIBERATIVE DEMOCRACY WITH CIVIC EDUCATION

Elly Nur Rahmawati, Samsuri, Suyato

Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman, Indonesia

Email: ellynur.2022@student.uny.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima:

27 Juni 2023

Disetujui:

10 Juli 2023

Kata Kunci:

demokrasi
deliberatif; Jürgen
Habermas;
pendidikan
kewarganegaraan

Abstrak

Kajian ini membahas relevansi antara konsep demokrasi deliberatif Jürgen Habermas dengan pendidikan kewarganegaraan. Konsep demokrasi deliberatif Habermas menekankan pentingnya komunikasi rasional dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik. Pendidikan kewarganegaraan, sebagai bagian penting dari proses pendidikan, bertujuan membentuk warga negara yang aktif, terlibat, dan memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan studi kepustakaan, dengan menggali referensi melalui kajian teoretis terhadap dokumen-dokumen seperti jurnal dan buku yang relevan dengan topik masalah. Kajian ini menjelaskan bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi landasan yang relevan bagi demokrasi deliberatif dan membantu membangun keterampilan komunikasi serta dialog rasional yang penting dalam demokrasi deliberatif. Selanjutnya, kajian ini menyoroti peran pendidikan kewarganegaraan dalam mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Kesimpulannya, kajian ini menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki relevansi yang kuat dengan demokrasi deliberatif Habermas. Melalui pendidikan kewarganegaraan, kita dapat membentuk warga negara yang memiliki pemahaman mendalam tentang demokrasi deliberatif, keterampilan komunikasi yang efektif, dan kesiapan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik yang melibatkan seluruh masyarakat.

Article Info**Article History****Received:**

June 27, 2023

Approved:

July 10, 2023

Keywords:*deliberative democracy,
Jurgen Habermas, civic
education***Abstract**

This study discusses the relevance of Jurgen Habermas' concept of deliberative democracy to civic education. Habermas' deliberative democracy emphasizes the importance of rational communication and active participation in political decision-making. Civic education, as an essential part of the educational process, aims to shape active and engaged citizens with a deep understanding of democratic principles. This study employs a literature review approach, exploring references through theoretical examinations of documents such as journals and books related to the topic. The study explains how civic education can serve as a relevant foundation for deliberative democracy and foster communication skills as well as rational dialogue, which are crucial in deliberative democracy. Furthermore, the study highlights the role of civic education in encouraging active citizen participation in political processes. In conclusion, this study emphasizes that civic education has a strong relevance to Habermas' deliberative democracy. Through civic education, we can shape citizens with a profound understanding of deliberative democracy, effective communication skills, and readiness to actively participate in political decision-making involving the broader community.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah upaya untuk mencetak generasi yang memiliki kompetensi di berbagai bidang. Pendidikan harus mampu menghasilkan sumber daya manusia dengan kompetensi yang menyeluruh. Pada abad ke-21, pendidikan dituntut untuk menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya mampu berpikir kritis, tetapi juga berkontribusi dalam membangun tatanan sosial dan ekonomi. Pendidikan sosial seseorang sebaiknya berfokus pada pendekatan kritis yang mencakup perdebatan, dialog, penyelidikan, serta pembelajaran berbasis proyek dan masalah (White, 2018). Dalam konteks ini, gagasan Demokrasi dan Pendidikan dari John Dewey menjadi sangat relevan untuk pendidikan abad ke-21. Dalam karyanya, Dewey menekankan tujuan pendidikan yang lebih luas, yaitu menumbuhkan semangat sosial pada siswa (Mason, 2017). Semangat sosial ini dapat didukung melalui pengembangan kecakapan kewarganegaraan, yang dibangun melalui pendidikan kewarganegaraan abad ke-21. Kecakapan ini mencakup tiga kategori utama yaitu kompetensi, kemampuan literasi dasar, dan kualitas karakter (Logan, 2016).

Demokrasi deliberatif, sebagai konsep yang dikembangkan oleh Jurgen Habermas (Habermas, 1996), menekankan pentingnya komunikasi rasional dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik. Di sisi lain, pendidikan kewarganegaraan adalah tahapan pembelajaran yang mempunyai tujuan membentuk warga negara yang aktif, terlibat, dan memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip demokrasi dan tanggung jawab kewarganegaraan. Relevansi antara demokrasi deliberatif Jurgen Habermas dengan pendidikan kewarganegaraan memiliki implikasi yang signifikan dalam membentuk masyarakat yang demokratis dan partisipatif. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana konsep demokrasi deliberatif Jurgen Habermas dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan bagaimana

pendidikan kewarganegaraan dapat mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses politik.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi landasan agar warga negara paham dan terlibat dalam demokrasi. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu dapat memperoleh pemahaman mengenai nilai-nilai demokrasi, tanggung jawab kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Pendidikan kewarganegaraan mampu untuk membantu sekolah mencapai keterampilan abad ke-21 dan meregenerasi norma sosial sebagai modal demokrasi (White, 2020). Hal ini memungkinkan warga negara untuk secara efektif berpartisipasi dalam proses demokrasi deliberatif, di mana komunikasi rasional dan dialog terbuka menjadi landasan dalam pengambilan keputusan politik. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga membantu dalam pengembangan keterampilan komunikasi dan dialog rasional. Individu dilatih untuk mendengarkan dengan empati, menghargai perbedaan pendapat, dan membangun argumen yang masuk akal. Keterampilan ini penting dalam konteks demokrasi deliberatif, di mana partisipasi publik yang aktif melalui diskusi yang bermakna dan dialog konstruktif menjadi elemen penting dalam pengambilan keputusan politik.

Dalam penelitian ini, akan dieksplorasi lebih lanjut tentang relevansi demokrasi deliberatif Jurgen Habermas dengan pendidikan kewarganegaraan. Fokus akan diberikan pada bagaimana konsep demokrasi deliberatif dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat membangun keterampilan komunikasi dan dialog rasional, serta bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Dengan memahami relevansi ini, diharapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi sarana efektif untuk membentuk warga negara yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang demokrasi deliberatif, keterampilan komunikasi yang efektif, dan motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik yang melibatkan seluruh masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan melihat literatur dan menganalisis topik yang relevan (Thomas et al., 2020). Penelitian kepustakaan menggunakan data akademik seperti buku dan jurnal yang diakses melalui Google Scholar, JSTOR, SAGE Journals untuk mencari artikel, jurnal, buku, atau dokumen yang relevan dengan topik yang dibahas. Sumber data penelitian studi kepustakaan ini adalah beberapa karya dari Jurgen Habermas tentang Demokrasi Deliberatif melalui beberapa kajian literatur jurnal yang relevan mengenai demokrasi deliberatif dan pendidikan kewarganegaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Landasan Demokrasi Deliberatif

Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam menanamkan karakter toleransi dan demokrasi pada peserta didik. Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan nilai-nilai moral melalui proses pendidikan yang berlangsung dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi (Santoso, 2021). Dalam konteks demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi untuk membangun dan memperkuat pemerintahan otonom. Pada implementasinya, pemerintahan otonom yang demokratis melibatkan partisipasi

aktif rakyat dalam mengelola pemerintahannya sendiri (Branson, 1999). Benhabib (2002) berpendapat bahwa demokrasi dan kewarganegaraan dapat berjalan selaras karena demokrasi memandang pendidikan sebagai proses persetujuan dan partisipasi, sedangkan kewarganegaraan mencerminkan rasa memiliki yang ditunjukkan oleh individu ketika mereka disosialisasikan melalui praktik pendidikan.

Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk landasan bagi demokrasi deliberatif. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu diberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, kesetaraan, dan hak-hak asasi manusia. Menurut Print (2013) kajian-kajian pendidikan kewarganegaraan secara umum berkaitan dengan kompetensi pengetahuan kewarganegaraan antara lain: pemerintah dan lembaga, hak dan tanggung jawab warga negara, identitas nasional, sejarah dan konstitusi serta sistem hukum dan supremasi hukum; hak asasi manusia, politik, ekonomi dan sosial; prinsip dan proses demokrasi; partisipasi aktif warga negara dalam isu-isu sipil; perspektif internasional; dan nilai kewarganegaraan demokratis. Melalui kompetensi yang telah diuraikan memungkinkan masyarakat untuk menjadi warga negara yang paham akan hak dan tanggungjawabnya dalam konteks demokrasi deliberatif. Pendidikan kewarganegaraan juga mempromosikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Dalam demokrasi deliberatif, partisipasi bukan hanya sebatas hak, tetapi juga menjadi tanggung jawab warga negara untuk berkontribusi dalam diskusi dan pengambilan keputusan politik. Menurut Miller (2020), pendidikan kewarganegaraan harus diberikan sebagai kebijakan sipil sehingga tidak hanya berfokus pada pengetahuan politik, tetapi juga mengajarkan warga negara bagaimana menjadi good citizen atau warga negara yang baik mampu berpartisipasi aktif salah satunya dalam bidang politik untuk membangun pemerintahan yang baik, yang fokus utamanya adalah pemerintahan untuk kesejahteraan umum dan akses pendidikan yang setara. Pendidikan kewarganegaraan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi dan bagaimana individu dapat berkontribusi secara aktif dalam pembentukan kebijakan publik.

Pembangunan Keterampilan Komunikasi dan Dialog Rasional

Konsep utama dalam demokrasi deliberatif adalah komunikasi rasional dan dialog terbuka antara warga negara. Penyampaian pengajaran dan pembelajaran sangat penting untuk hasil pendidikan keterampilan abad ke-21. Lembaga pendidikan dan pelatihan teknik perlu menerapkan model pedagogis. Keterampilan di berbagai bidang seperti pemikiran kritis, komunikasi yang efektif, inovasi, dan pemecahan masalah, model pedagogi harus memenuhi kebutuhan ini dengan cara pendekatan model transmisi informasi tradisional yang tertanam (Frache et al., 2019). Pendidikan kewarganegaraan dapat membantu membangun keterampilan komunikasi yang efektif dan dialog rasional di antara individu-individu. Melalui pendidikan kewarganegaraan, mereka belajar untuk mendengarkan dengan empati, menghargai perbedaan pendapat, dan mengajukan argumen yang masuk akal.

Menurut Miller (2020), menjadi warga negara yang baik harus mempunyai kebiasaan individu, berpendidikan secara mendalam dan luas. Warga negara yang berbudi luhur, harus membiasakan berpikir (akal) dan bertindak dengan baik dan berakhlak. Warga negara yang baik, juga ditentukan oleh partisipasi politiknya. Warga negara dapat berpartisipasi dalam dua cara: dengan berpartisipasi dalam memerintah dan diperintah secara bergantian. Warga negara yang baik pada akhirnya akan memengaruhi institusi politik.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi serta mengembangkan keterampilan, melalui proses pembelajaran yang lebih interaktif (Kerr, 1999). Pendidikan kewarganegaraan juga membantu mengatasi polarisasi dan konflik dalam masyarakat. Dengan mempromosikan dialog terbuka dan penghormatan terhadap perspektif orang lain, pendidikan kewarganegaraan membantu mengurangi ketegangan dan membangun pemahaman yang lebih baik antara individu-individu dengan latar belakang dan pandangan yang berbeda.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Media Partisipasi Aktif

Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik. Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi tersebut. Dewey memiliki pemahaman yang kuat tentang karakteristik pendidikan yang memadai. Pendidikan demokrasi harus memenuhi dua tujuan utama: mengajarkan siswa berpikir kritis dan mempersiapkan mereka untuk peran sosial (van der Ploeg, 2019). Pengembangan warga negara yang berpengetahuan didorong untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan toleran terhadap orang lain. Sekolah menjadi lingkungan sipil yang penting untuk pengembangan kewarganegaraan tetapi dalam konteks baru di mana kesempatan belajar lebih beragam dan otonomi siswa ditingkatkan dengan teknologi dan lingkungan sipil melampaui sekolah ke rumah, antar tindakan, ruang pribadi media sosial dan organisasi komunitas (Davies, 2020). Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu didorong untuk menjadi warga negara yang aktif, terlibat dalam isu-isu publik, dan berpartisipasi dalam diskusi dan debat yang melibatkan pengambilan keputusan politik.

Melalui gerakan sosial dan gerakan pendidikan populer memiliki peran penting untuk memfasilitasi pembelajaran orang dewasa untuk demokrasi kritis yang melibatkan struktur pemerintahan, lokal dan internasional (Franch, 2020). Pendidikan kewarganegaraan juga memberikan pengetahuan tentang proses politik, institusi-institusi demokratis, dan cara-cara efektif untuk berpartisipasi dalam sistem politik. Ini melibatkan pemahaman tentang hak suara, proses pemilihan, gerakan sosial, advokasi, dan pengaruh individu dalam membentuk kebijakan publik. Dengan pemahaman ini, pendidikan kewarganegaraan membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi deliberatif.

SIMPULAN

Relevansi antara konsep demokrasi deliberatif Jurgen Habermas dengan pendidikan kewarganegaraan sangat signifikan. Pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai landasan bagi demokrasi deliberatif, membangun keterampilan komunikasi dan dialog rasional, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses politik. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif melalui sistem pendidikan yang disusun ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, sehingga mampu membentuk warga negara memiliki pemahaman serta mampu mempraktikkan demokrasi sehingga mampu berkontribusi secara aktif dalam pembentukan kebijakan publik.

DAFTAR RUJUKAN

- Benhabib, S. (2002). *The claims of culture: Diversity equality and in the global era*. Princeton University Press.
- Branson, M. S. (1999). *Belajar civic education dari Amerika*. LKiS.
- Davies, I. (2020). Civic and citizenship education in volatile times. Preparing students for citizenship in the 21st century. *British Journal of Educational Studies*, 68(1), 125–127. <https://doi.org/10.1080/00071005.2019.1676009>
- Frache, G., Tombras, G. S., Nistazakis, H. E., & Thompson, N. (2019). Pedagogical approaches to 21st century learning: A model to prepare learners for 21st century competencies and skills in engineering . 2019 *IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)*, 711–717. <https://doi.org/10.1109/EDUCON.2019.8725214>
- Franch, S. (2020). Global citizenship education: A new ‘moral pedagogy’ for the 21st century? *European Educational Research Journal*, 19(6), 506–524. <https://doi.org/10.1177/1474904120929103>
- Habermas, J. (1996). The European nation state. Its achievements and its limitations. On the past and future of sovereignty and citizenship. *Ratio Juris*, 9(2), 125–137.
- Kerr, D. (1999). Citizenship education in the curriculum: An international review. *School Field*, 10(3/4), 5–32.
- Logan, A. (2016). *Digital Citizenship in 21st Century Education*. Dominican University of California. <https://doi.org/10.33015/dominican.edu/2016.edu.08>
- Mason, L. E. (2017). The Significance of Dewey’s & Democracy and Education for 21th Century Education. *Education and Culture*, 33(1), 41. <https://doi.org/10.5703/educationculture.33.1.0041>
- Miller, B. (2020). *Aristotle on citizenship and civic education: The central role of political participation*. The Palgrave Handbook of Citizenship and Education, 17–33.
- Print, M. (2013). Competencies for democratic citizenship in Europe. *Civic Education and Competences for Engaging Citizens in Democracies*, 37–49.
- Santoso, G. (2021). The philosophical power of civic education 21st century in Indonesia. *IJEBD (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, 4(1), 72–79. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v4i1.1220>
- Thomas, J., Utley, J., Hong, S.-Y., Korkmaz, H., & Nugent, G. (2020). A Review of the Research. *Handbook of Research on STEM Education*.
- van der Ploeg, P. A. (2019). Dewey and citizenship education: Schooling as democratic practice. In Peterson, A., Stahl, G., Soong, H. (eds), *The Palgrave Handbook of Citizenship and Education* (pp. 1–14). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67905-1_20-1
- White, C. (2018). Global education in the 21st Century. In C. White, *Internationalizing Education* (pp. 25–31). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004364622_003
- White, C. S. (2020). Wielding social media in the cyber-arena: Globalism, nationalism, and civic education. *Research in Social Sciences and Technology*, 5(1), 1–21. <https://doi.org/10.46303/ressat.05.01.1>